

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwasanya guna menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan dengan efisien, efektif dan bersasaran maka diperlukan penyusunan perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan tersebut terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga serta pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya harus menyusun perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Demikian juga halnya dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya serta guna pencapaian tujuan pembangunan daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis SOPD. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Bukittinggi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SOPD .

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat dengan Renstra SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra- SOPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SOPD dengan berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra SOPD disusun dengan tahapan:

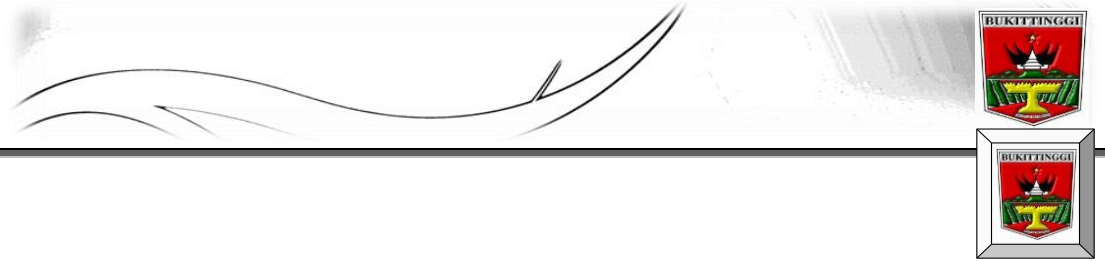
- 1) Persiapan penyusunan Renstra SOPD;
- 2) Penyusunan rancangan Renstra SOPD;
- 3) Penyusunan rancangan akhir Renstra SOPD; dan
- 4) Penetapan Renstra SOPD.

Persiapan penyusunan Renstra SOPD berkaitan dengan Pembentukan Tim penyusun, orientasi mengenai Renstra SOPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi yang terkait. Penyusunan rancangan Renstra SOPD berkaitan dengan perumusan rancangan Renstra SOPD yang mencakup pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SOPD, review terhadap Renstra Kementerian dan SOPD Provinsi, penelaahan RTRW Kota, Perumusan isu-isu strategis serta perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program kegiatan. Selanjutnya penyusunan rancangan Renstra SOPD berkaitan dengan penyajian rancangan Renstra SOPD sesuai dengan sistematika penyajian. Penyusunan rancangan akhir Renstra SOPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SOPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir yang telah disempurnakan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah yang selanjutnya Kepala SOPD menetapkan Renstra SOPD menjadi pedoman SOPD dalam menyusun rancangan Renja SOPD.

Proses penyusunan Rencana Strategis SOPD dapat dilihat pada gambar berikut.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN RANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



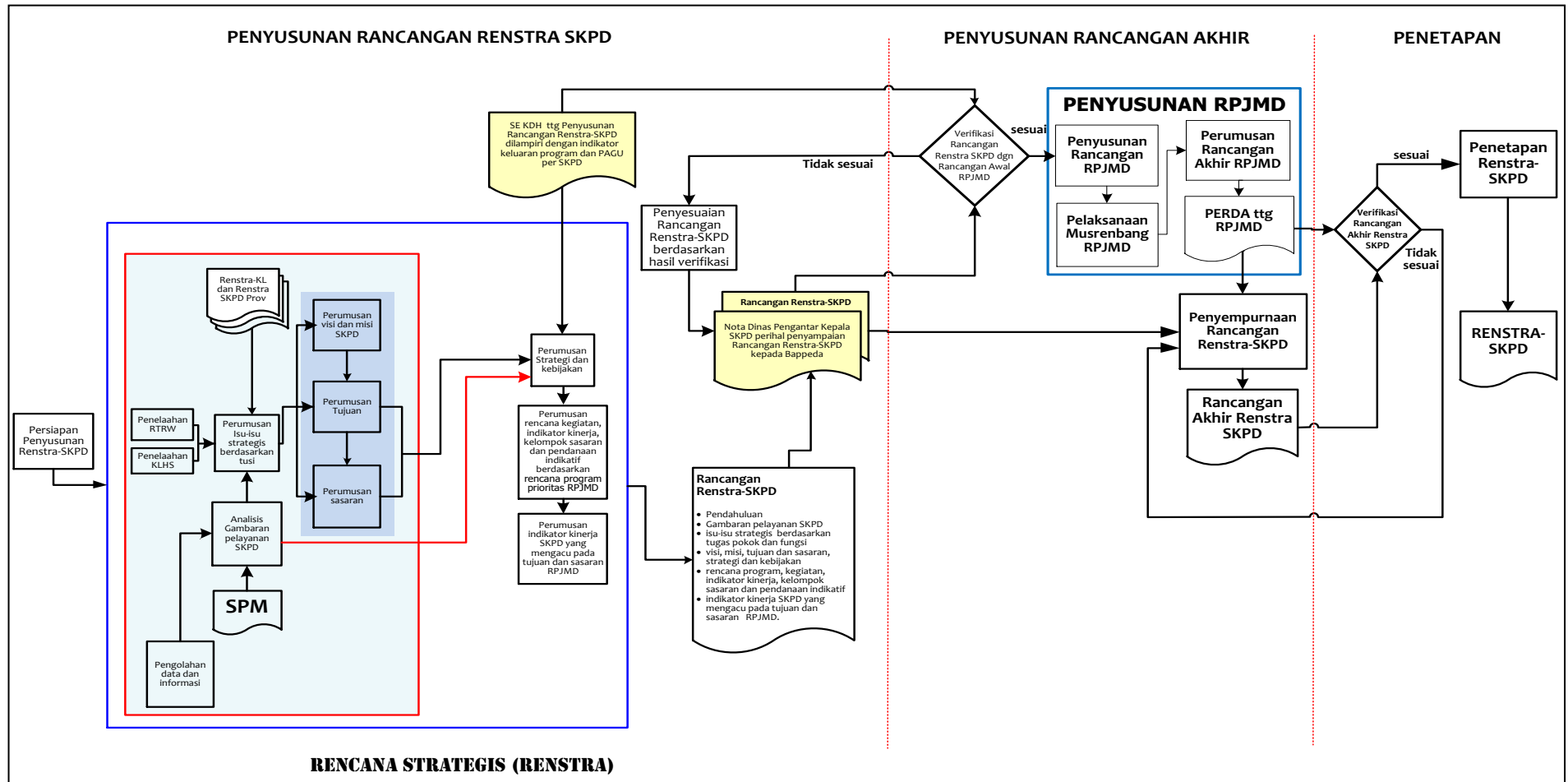
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN RANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021





enstra SO

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021**

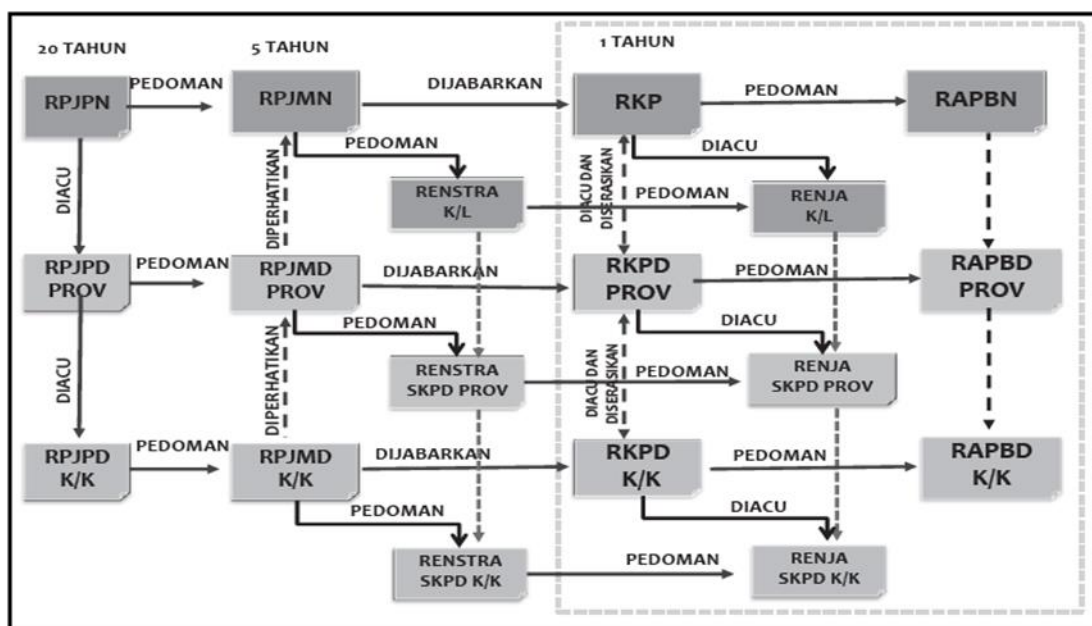


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

Salah satu prinsip perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Renstra SOPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Penyusunan Renstra SOPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berpedoman kepada RPJMD Kota Bukittinggi dan juga memperhatikan dalam artian menelaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dilakukan guna menyelaraskan tujuan kebijakan pembangunan nasional. Keterkaitan Renstra SOPD dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah terlihat pada gambar berikut.

Gambar 1.2.
Hubungan Renstra SOPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



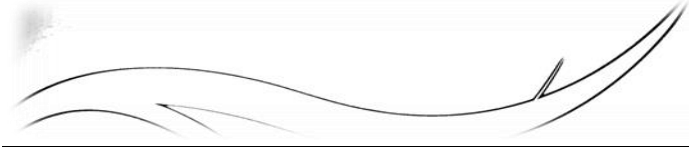


Selain kaitannya dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah, penyusunan Renstra SOPD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan

pelayan
anan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



SOPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SOPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SOPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SOPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Sedangkan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan. Dengan demikian dampak dan/atau resiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang dapat menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 disusun dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



- 4 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 nomor 13);
- 9 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
- 10 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



- 11 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013;
- 12 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
- 13 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- 14 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III Serta Rincian Tugas Eselon IV Pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dimaksudkan agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pencapaian visi SOPD mendukung pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi serta selaras dengan pembangunan daerah provinsi serta pembangunan nasional.

Tujuan dari penulisan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Menjamin sinergitas pembangunan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Menyediakan tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

1.4. SISTEMATI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis SOPD .

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SOPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SOPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SOPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SOPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SOPD ini.

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian mengemukakan identifikasi permasalahan SOPD , Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rentra K/L dan Renstra SOPD Provinsi serta RTRW dan KLHS.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini mengemukakan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan SOPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SOPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SOPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB
VII**

PENUTUP

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kantor Kesatu

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

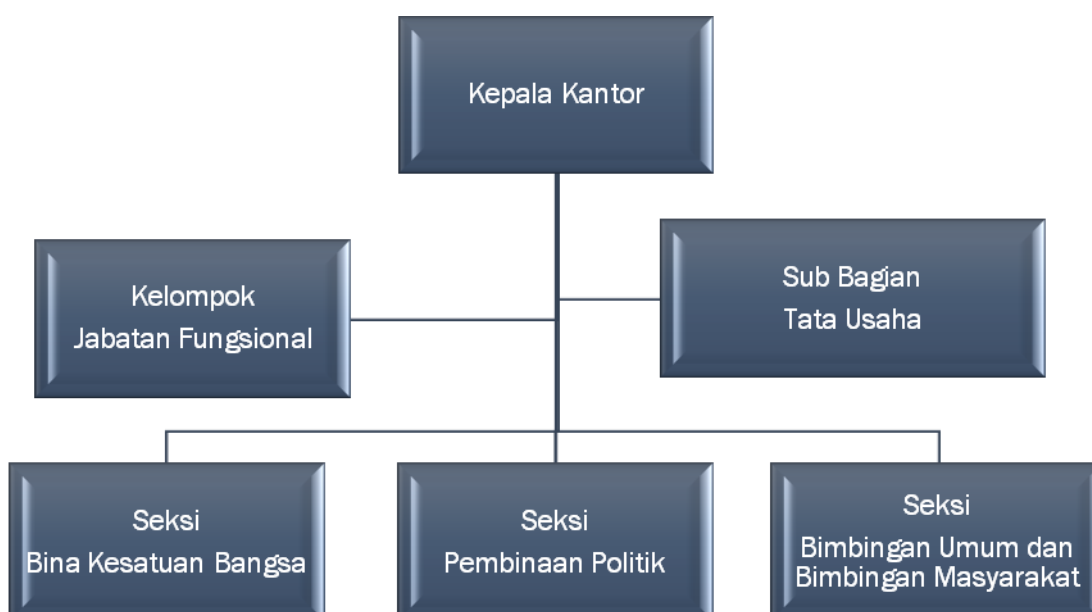
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pemberian dukungan atas Kewaspadaan Dini;
- d. Peningkatan Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi


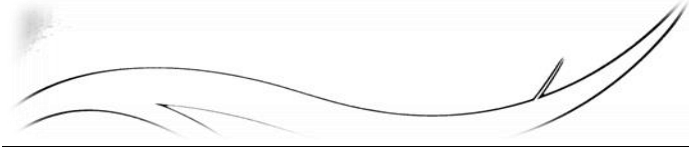


U

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

raian

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



tugas pokok dan fungsi berdasarkan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kantor

1. Kepala Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan politik.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Kantor Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordaisikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/ kewenangan pemerintah daerah;
 - c. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang kesatuan banga dan politik;
 - d. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan administrasi penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap bimbingan politik masyarakat;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha

1. S
u

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



b Bagian Tata Usaha mempunyai tugas penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan kantor dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumah tanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, urusan hukum, organisasi tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional, menyelenggarakan kepustakaan.

2. Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun Peraturan perundangan-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah, perlengkapan, keuangan, pendataan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan di bidang pelayanan ketatausahaan kantor;
- c. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pada ketatausahaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bagian Tata Usaha sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis Kantor Kesbangpol;
- e. Menyusun program, rencana kerja berbasis kinerja Sub Bagian Tata Usaha;
- f. Melaksanakan, menghimpun dan mengkoordinasikan dengan masing-masing seksi dalam penyusunan program dan rencana kerja tahunan yang meliputi (Renstra, Renja, Lakip, LPPD dan LKPJ) Kantor Kesbangpol;
- g. Menyiapkan pedoman pelaksana tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol;
- h. Menyusun standar pelayanan minimal pada Kantor Kesbangpol;

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



- ngendalikan, menyelenggarakan ekspedisi surat masuk/surat keluar;
- j. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokolan, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan pengandaan serta pendistribusian;
 - k. Mengusulkan pelelangan barang, penghapusan barang di lingkungan kantor;
 - l. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
 - m. Meyiapkan barang dan perlengkapan kantor;
 - n. Menyiapkan DP3, menyusun DUK, bezetting pegawai;
 - o. Menyiapkan bahan dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun pegawai;
 - p. Menyiapkan permintaan kartu pegawai kartu istri/suami serta kartu Taspen;
 - q. Mengusulkan pimpinan kegiatan dan pemegang kas;
 - r. Membuat laporan mutasi barang;
 - s. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai;
 - t. Menyiapkan bahan usulan dan persyaratan pegawai yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
 - u. Memproses pegawai yang akan pindah dan yang akan di tempatkan;
 - v. Melaksanakan dan melaporkan kehadiran pegawai dan apel;
 - w. Menyiapkan bahan urusan organisasi tatalaksana dan kehumasan kantor;
 - x. Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan pegawai;
 - y. Memberikan pembinaan administrasi dalam melaksanakan tugas tenaga fungsional;
 - z. Menyiapkan bahan usulan penghargaan/ pemberian tanda kehormatan pegawai;
 - aa. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran satuan kerja;
 - bb. Meneliti laporan SPJ pemegang kas;
 - cc. Menyelenggarakan anggaran belanja kantor dengan berpedoman

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



- da APBD yang telah ditetapkan;
- dd. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas dan transportasi serta kesejahteraan pegawai ;
 - ee. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran satuan kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan verifikasi;
 - ff. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
 - gg. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data bidang ketatausahaan;
 - hh. Mengkoordinasikan penyiapan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring;
 - ii. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data bidang ketatausahaan;
 - jj. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan program rencana pembangunan pada masing- masing seksi;
 - kk. Mengumpulkan, menghimpun mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;
 - ll. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan kantor;
 - mm. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor;
 - nn. Memantau, dan merekap pencapaian hasil kerja bidang ketatausahaan;
 - oo. Melaksanakan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - pp. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, bahan dan data menurut aturan yang berlaku;
 - qq. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - rr. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



uran yang berlaku;

- ss. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;
- tt. Melaksanakan, membantu tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Seksi Bina Kesatuan Bangsa

1. Seksi Bina Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan program terhadap pembinaan kesatuan bangsa dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi bidang peningkatan pemahaman kesatuan bangsa, mengumpulkan informasi terhadap masalah sosial politik, dan budaya dalam pembinaan kesatuan bangsa, melakukan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran ideologi negara ketahanan bangsa dan ekonomi, demokratisasi dan sosial budaya, peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, pemberdayaan aparatur, kerukunan hidup antar golongan, etnis, suku dan umat beragama, pengawasan, pemantauan, dan penelitian, terhadap orang dan lembaga asing.
2. Rincian Tugas Seksi Bina Kesatuan Bangsa adalah sebagai berikut :
 - a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan bina kesatuan bangsa sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. Menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan kesatuan bangsa;
 - c. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bina kesatuan bangsa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi bina kesatuan bangsa sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis Kantor Kesbangpol;
 - e. Menyusun program kerja dan rencana kerja berbasis kinerja seksi bina kesatuan bangsa;
 - f. Menyusun standar pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

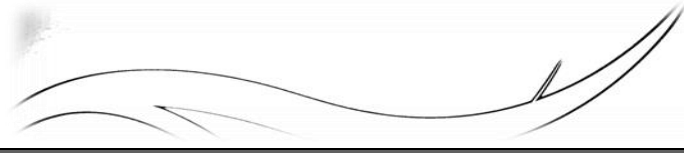
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



- na kesatuan bangsa;
- g. Melakukan, mengajak partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program kegiatan terkait pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dampak yang timbul sebagai kemitraan antara masyarakat, aparat pemerintah, swasta, LSM dan Perguruan Tinggi dalam pengembangan program bina kesatuan bangsa;
 - h. Melakukan pemantauan dan penelitian terhadap lembaga non pemerintah dan orang-orang asing;
 - i. Melakukan upaya peningkatan ketahanan bangsa melalui sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara;
 - j. Menyusun program kerja dalam hubungan kerjasama dan koordinasi antar aparat unsur intelijen yang dihimpun dalam Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) sebagai fokus komunikasi dan koordinasi;
 - k. Menyusun program kerja dan memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah tentang bela negara dan menjaga kedaulatan keutuhan NKRI;
 - l. Memprogramkan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Bela Negara (PPKBN) secara sistematis dan berkelanjutan ke dalam agenda tahunan Kantor Kesbangpol;
 - m. Menyusun dan melaksanakan program serta memfasilitasi dan membuat laporan hasil kerja bidang seksi bina kesatuan bangsa;
 - n. Memantau/ merekap pencapaian hasil kerja bina kesatuan bangsa;
 - o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - p. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, bahan dan data menurut aturan yang berlaku;
 - q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - r. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
 - s. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



laksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Seksi Pembinaan Politik

1. Seksi Pembinaan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan program terhadap pembinaan politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi di bidang hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penyelenggara pemilihan umum, partai politik, bidang hubungan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, bidang mediasi, fasilitasi dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum di daerah serta bidang pemberdayaan lembaga infrastruktur politik.
2. Rincian Tugas Seksi Pembinaan Politik adalah sebagai berikut:
 - a. Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pembinaan politik sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. Menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan politik;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengkajian dan perkembangan politik dan kesiapsiagaan terhadap perkumpulan organisasi-organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbau unsur sara atau isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat;
 - d. Menghimpun, menelaah ketentuan dalam peraturan yang ada dalam prosedur pengajuan dan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Partai Politik;
 - f. Melakukan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja partai politik;
 - g. M
e

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021





- lakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembauran kebangsaan melalui kegiatan integrasi sosial anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
- h. Melakukan sosialisasi pembauran kebangsaan untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan secara meluas dan merata;
 - i. Mengadakan pembinaan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan daerah dan aturan lainnya serta produk hukum terhadap perkembangan politik;
 - j. Mengadakan pembinaan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan daerah dan aturan lainnya serta produk hukum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - k. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi pembinaan politik sesuai program dan urusan dengan mempedomi rencana strategis Kantor Kesbangpol;
 - l. Menyusun program rencana kerja berbasis kinerja seksi pembinaan politik;
 - m. Menyusun standar pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang pembinaan politik;
 - n. Melakukan, memberikan fasilitasi terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - o. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bidang pembinaan politik;
 - p. Menyusun dan membuat laporan hasil kerja bidang seksi Pembinaan Politik;
 - q. Memantau, merekap pencapaian hasil kerja bidang pembinaan politik;
 - r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - s. Melakukan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan;

t. M
e

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



nyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;

- u. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
- v. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;
- w. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Seksi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat

1. Seksi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan program bimbingan masyarakat dalam arti melaksanakan koordinasi, kerjasama, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi, evaluasi dan monitoring, pendataan dan pelaporan di bidang pengarahan, pengorganisasian dan peningkatan sumber daya manusia dalam melakukan bimbingan umum dan bimbingan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara.
2. Rincian Tugas Seksi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pembinaan umum dan pembinaan masyarakat sebagai pedoman landasan kerja;
 - b. Menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang bimbingan umum dan bimbingan masyarakat;
 - c. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bimbingan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi bimbingan umum dan bimbingan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

e. M
e

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



- nyusun program dan rencana kerja berbasis kinerja seksi bimbingan umum dan bimbingan masyarakat;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengkajian dan pengembangan program kesiagaan dalam pelaksanaan bimbingan umum dan bimbingan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - g. Mengimpun, memantau dan membina Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah dari elemen masyarakat;
 - h. Menghimpun, memantau dan membina Organisasi Masyarakat (Ormas) sebagai organisasi non pemerintah bervisikan kebangsaan;
 - i. Melakukan koordinasi SOPD terkait dalam memantau dan membina Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang disiapkan dan dibekali pengetahuan, keterampilan terhadap masyarakat dalam berpolitik;
 - j. Menghimpun, memantau dan melakukan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah dari elemen masyarakat;
 - k. Membina, memantau dan mengawasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai wadah untuk informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat;
 - l. Membina, memantau dan mengawasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - m. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan forum komunikasi yang ada kepada pimpinan;
 - n. Melaksanakan, menyusun program serta memfasilitasi dan membuat laporan hasil kerja bidang bimbingan umum dan bimbingan masyarakat;
 - o. Memantau, dan merekap pencapaian hasil bimbingan umum dan bimbingan masyarakat;
 - p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;

q. M
e

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



- laksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan data kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai dokumen kerja;
 - s. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan;
 - t. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;
 - u. Melaksanakan, membantu tugas lain diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Dalam pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 20 (dua puluh) orang. Rincian sumber daya manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	4
3	Golongan II	12
4	Golongan I	-
Jumlah		20

Tabel 2.2.
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi
Berdasarkan Pendidikan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Strata 2	3
2	Strata 1 / D4	11
3	Sarjana Muda/ D3/D2	2
4	SLTA / Sederajat	4
5	SLTP / Sederajat	-
6	SD	-
Jumlah		20

Selain sumber daya manusia, pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi juga ditunjang dengan keberadaan sarana dan prasarana yang tercatat sebagai asset Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Terkait dengan bangunan gedung kantor, dalam pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi masih bergabung dengan Kantor DPKAD Kota Bukittinggi. Bangunan Gedung yang dipakai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi saat ini dinilai belum representatif dan belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana Pemerintah Kota Bukittinggi, karena kantor tersebut terdiri dari 2 (dua) ruangan; yakni ruangan Kepala Kantor dan ruangan Kasubag/Kasi beserta seluruh staf yang sekaligus juga difungsikan sebagai tempat pelayanan pengurusan rekomendasi penelitian dan pengurusan pendaftaran Organisasi Masyarakat. Selanjutnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi seperti kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor juga belum sepenuhnya sesuai dengan standar sarana dan prasarana Pemerintah Kota Bukittinggi. Gambaran keberadaan sarana dan prasarana penunjang tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

Sara
na
dan



Prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi

No	Jenis	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor	Bergabung dengan DPKAD
2	Kendaraan Roda 4	1 unit
3	Kendaraan Roda 2	4 unit
4	Mesin Ketik	3 unit
5	Filling besi	1 unit
6	Filling Kayu	8 unit
7	Lemari Sorok	2 unit
8	Papan Pengumuman	5 unit
9	Mesin Absensi	1 unit
10	Overhead Projektor	1 unit
11	Kursi Tangan	14 unit
12	Kursi Putar	25 unit
13	Meja Komputer	3 unit
14	Meja ½ biro	22 unit
15	AC Split	1 unit
16	Ex Haust Van	1 unit
17	Televisi	3 unit
18	Voice Recorder	1 unit
19	Kamera Digital	2 unit
20	Tabung Racun Api	1 Unit
21	PC	4 unit
22	Laptop	4 Unit
23	Printer	5 Unit
24	Kursi Tamu	3 Unit
25	Pesawat Telepon	2 Unit
26	Handy Talky	12 Unit
27	Faximile	1 Unit

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



2.3. KINERJA PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi secara umum bersifat non fisik sehingga secara kasat mata memang kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak dapat terlihat langsung namun secara nyata dapat dirasakan. Kondisi stabilitas kota yang kondusif dengan terciptanya kesatuan bangsa, tidak terjadinya konflik antar suku, ras, agama ataupun gangguan keamanan lainnya merupakan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bersama instansi terkait dalam menumbuhkembangkan rasa kesatuan bangsa, kerukunan umat beragama, pembauran kebangsaan dan deteksi dini potensi ancaman dan gangguan stabilitas di daerah.

Gambaran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berdasarkan sasaran/ target Rencana Strategis periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SOPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SOPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SOPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengawasan Orang Asing				70%	80%	85%	87%	90%	70%	80%	85%	87%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				70%	80%	85%	87%	90%	70%	80%	85%	87%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi				70%	75%	85%	95%	100%	70%	75%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Ideologi Negara dan Bela Negara				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)				0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



11	Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik				100%	90%	92%	94%	95%	0%	90%	92%	94%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi				100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat				100%	70%	75%	85%	95%	0%	70%	75%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan				0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
18	Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada				0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
20	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada				0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
21	Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
22	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian				0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
23	Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi Di Daerah				0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



24	Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana				0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
25	SATGAS Saber Pungli				100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
26	Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental				0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
27	Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik				0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Pembinaan kepada kader Parpol				0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
29	Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa lainnya bahaya Narkoba				0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
30	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya				0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%

DANA HIBAH

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SOPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SOPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bantuan Kelengkapan Satgas FKPP				0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



Secara umum kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi periode Rencana Strategis Tahun 2010-2015 dinilai baik. Hampir seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dari 14 Indikator Kinerja yang ditetapkan, hanya 1 indikator yang tingkat capaiannya kurang baik. Indikator kinerja yang kurang tercapai adalah pelaksanaan upacara kesadaran nasional dan hari besar lainnya. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan upacara sering bersamaan dengan upacara lainnya dan telah dilaksanakan oleh SOPD dan pihak terkait lainnya. Pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 merupakan hasil dari kerja keras seluruh aparatur dengan bekerjasama dengan stakeholders terkait.

Selanjutnya, hasil analisis terhadap pengelolaan pendanaan pelayanan SOPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 secara umum menunjukkan bahwa penganggaran telah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah guna pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD. Terkait dengan realisasi anggaran, Kantor Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun 2011-2015 dapat merealisasikan anggaran dengan rata-rata 90.91%. Kekurangan realisasi anggaran dari angka 100% lebih disebabkan oleh efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Gambaran pengelolaan pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015 digambarkan pada tabel berikut.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SOPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	2.235.573.000	2.332.097.150	3.187.682.322	3.573.794.360	3.948.910.477	2.093.568.340	2.153.444.927	2.897.690.076	3.062.911.624	3.631.022.293	93,65	92,34	90,90	85,70	91,95	12,68	14,16
Belanja tidak langsung	903.053.500	937.451.000	1.068.222.672	1.280.532.360	1.453.187.127	895.011.674	857.993.177	1.024.170.009	1.270.547.476	1.433.286.542	99,11	91,52	95,88	99,22	98,63	8,50	9,88
Belanja langsung	1.332.519.500	1.394.646.150	2.119.459.650	1.293.262.000	2.495.723.350	1.198.556.666	1.295.421.750	1.873.520.067	1.792.364.148	2.197.735.751	89,95	92,89	88,40	78,16	88,06	16,02	18,19
- Belanja pegawai	936.275.000	928.885.000	1.009.455.000	1.075.230.000	1.230.070.000	881.455.000	923.210.000	978.605.000	1.068.485.000	1.222.540.000	94,14	99,39	96,94	99,37	99,39	8,25	10,93
- Belanja barang dan jasa	385.244.500	445.561.150	1.080.004.650	1.135.432.000	1.181.715.850	311.307.166	365.075.750	866.330.667	644.206.148	893.906.651	80,81	79,92	80,22	56,74	75,64	34,77	43,94
- Belanja modal	11.000.000	20.200.000	30.000.000	82.600.000	83.937.500	5.205.500	16.136.000	28.584.400	79.673.000	81.289.100	52,68	79,88	95,28	96,46	96,84	45,62	69,29
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



Dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi selain dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana, aspek pendanaan juga merupakan hal yang sangat penting. Sehubungan dengan pengelolaan pendanaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015, secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik. Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi tidak mengelola pendapatan karena tidak difungsikan sebagai SOPD yang menerima pendapatan. Pengelolaan belanja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi terdiri dari; 1).Belanja Tidak Langsung yang merupakan Belanja Gaji dan Tunjangan aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, dan 2).Belanja Langsung yang merupakan pendukung dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan SOPD. Belanja Langsung tersebut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja modal. Belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi secara rata-rata meningkat setiap tahunnya, hal ini disebabkan guna kebutuhan operasional kegiatan dan juga penyesuaian dari standar harga setiap tahunnya. Terkait dengan realisasi anggaran yang telah disediakan, secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan menjalankan program dan kegiatan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJMN dan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi, beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan memelihara stabilitas politik dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas adalah:

1. Perkembangan global dan nasional yang mempengaruhi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Dinamika politik nasional yang sangat dinamis mempengaruhi kehidupan politik daerah;
3. Masyarakat Kota Bukittinggi yang heterogen dengan tingkat aktifitas yang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



dat serta tingginya tingkat kunjungan membutuhkan pengawasan yang ketat guna menjaga stabilitas daerah.

Peluang dalam pengembangan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah:

1. Peraturan perundang-undangan yang memadai dalam mengatur tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
2. Kehidupan masyarakat Kota Bukittinggi yang masih berpegang teguh kepada agama dan adat serta kerukunan masyarakat Kota Bukittinggi yang telah terjalin dengan baik.
3. Kehidupan masyarakat Kota Bukittinggi yang bersifat demokratis dan santun sesuai dengan budaya Minangkabau;
4. Komitmen Pimpinan Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi belum mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seutuhnya;
2. Kurang mendukungnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yang sangat kompleks;
3. Belum maksimalnya hubungan koordinasi dengan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, LSM, Partai Politik dalam mendukung penciptaan suasana yang kondusif;
4. Forum-forum koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas masih ada yang belum terbentuk dan yang sudah terbentuk belum dikelola dengan maksimal;

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Seiring dengan telah dilantiknnya Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih periode 2016-2021, pada tanggal 17 Februari 2016, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-616 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Tentang Pengangkatan Walikota Bukittinggi Provinsi

Sum
atera

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



Barat maka Visi Misi kepala Daerah terpilih tersebut selanjutnya dijabarkan dalam dokumen perencanaan lima tahun daerah dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025. Adapun visi dan Misi tersebut adalah:

“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”.

Ada 5 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari Visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Setelah dilakukan analisa dan keterkaitan antara RPJPD Kota Bukittinggi tahun 2006 -2025 dengan Visi dan Misi maka yang menjadi prioritas utama pembangunan daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental, penerapan ajaran agama, adat dan budaya;
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Pengembangan pariwisata;
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
7. Penanggulangan kemiskinan;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur;
9. Pelestarian lingkungan hidup.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021





Berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sebagai unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dalam pelaksanaan prioritas utama pembangunan Kota Bukittinggi adalah menciptakan situasi dan kondisi Kota Bukittinggi yang kondusif dengan bekerjasama dengan pihak terkait. Situasi kota yang kondusif terlihat melalui terciptanya keamanan dan ketertiban, semangat kesatuan bangsa, demokrasi, dan kerukunan yang selalu terjaga.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: *"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"*

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian dalam Negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya,

yaitu

men

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021





angani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Menegakkan Demokrasi

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

3. Menjaga Integrasi Bangsa:

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, yang berkaitan dengan Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu:

1. M
e

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



tingkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan;

2. Meningkatkan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat;
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi.

Arah kebijakan Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, dilaksanakan melalui strategi:

1. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
3. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
4. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.

Program Kementerian Dalam Negeri dalam pencapaian visi dan misi yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Dengan sasaran program yaitu meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya; terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri; serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP), yaitu:

1. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam);
2. Tidak berkembangnya secara berarti jumlah konflik berlatar belakang isu SARA;
3. Prosentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

Progr
am



ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
2. Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan.
3. Fasilitasi Politik Dalam Negeri
4. Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik.
5. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
7. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
8. Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik.
9. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
10. Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
11. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
12. Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, beberapa hal yang menjadi perhatian adalah:

1. Pembentukan dan pementapan forum-forum komunikasi seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama, dan forum lainnya dalam memantapkan nilai-nilai kesatuan bangsa, toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan.

2. M
e

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, yang mengatur tentang struktur dan pola ruang dengan indikasi program pemanfaatan ruang. Terkait dengan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yang lebih bersifat non fisik, maka secara langsung keterkaitan antara tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dengan RTRW tidak bersinggungan langsung. Namun yang menjadi perhatian bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi terhadap RTRW adalah pemanfaatan ruang jangan menjadi potensi konflik di tengah-tengah masyarakat. Karena pertumbuhan Kota Bukittinggi yang semakin berkembang, berimplikasi kepada tingginya permintaan masyarakat akan pemanfaatan ruang yang semakin menurun ketersediannya.

Demikian juga halnya dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi tidak berhubungan langsung dengan lingkungan hidup.

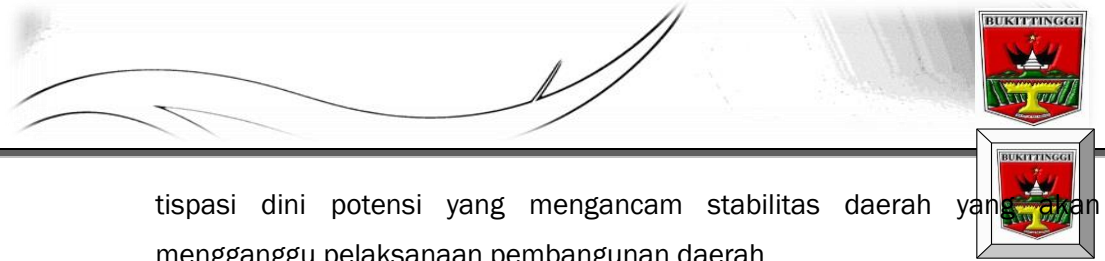
3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis internal dan eksternal dari Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, ditentukan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Pembenahan struktur organisasi serta penguatan sumber daya manusia dan sarana prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
2. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
3. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas;

4. A
n

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



tispasi dini potensi yang mengancam stabilitas daerah yang akan mengganggu pelaksanaan pembangunan daerah

5. Berkembangnya aliran kepercayaan masyarakat/penghayat kepercayaan, ormas keagamaan, dan pengakuan terhadap agama di luar agama yang diakui pemerintah;
6. Berkembangnya kelompok Radikal;
7. Semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
8. Perkembangan Organisasi kemasyarakatan yang semakin pesat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

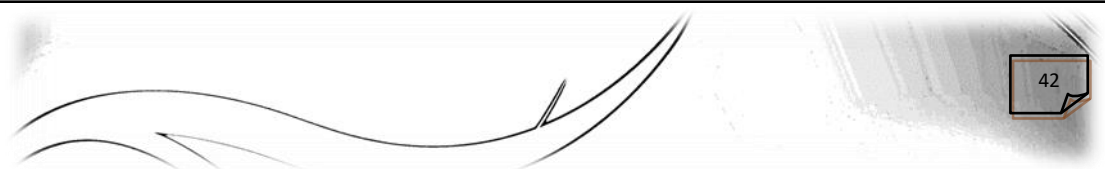
Perumusan Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis terkait lingkup tugas

Kant

or

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.



Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yaitu:

***“Terwujudnya Kesatuan Bangsa Dalam Kehidupan Masyarakat Kota Bukittinggi
Yang Demokratis”***

Makna yang terkandung dalam pernyataan visi adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Bangsa mempunyai makna bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Prinsip persatuan dan kesatuan bangsa adalah Bhinneka Tunggal Ika, Nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan nusantara dan persatuan pembangunan guna mewujudkan cita-cita nasional.
2. Kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sesuai dengan yang di anut oleh bangsa Indonesia yakni demokrasi Pancasila.

Guna mewujudkan visi tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
2. Memantapkan nilai-nilai kesatuan bangsa.
3. Menciptakan kehidupan politik yang demokratis dan santun.

**4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI**

KANTOR

Berdasarkan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam artian hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi, yang selanjutnya dirumuskan menjadi tujuan Kantor Kesatuan

Bang
sa

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



dan Politik Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel.
2. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Menciptakan suasana aman, nyaman, tentram dan tertib di masyarakat.
4. Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis.

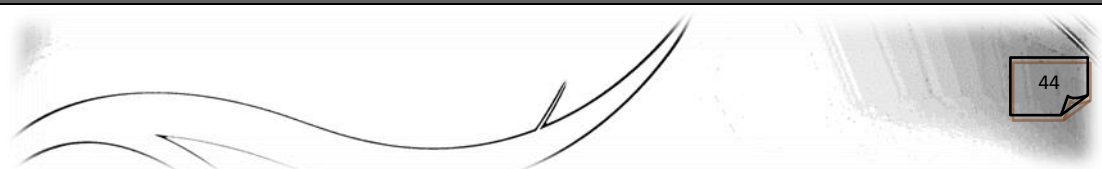
Sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah:

1. Meningkatnya tata kelola organisasi.
2. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
3. Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan, kenyamanan lingkungan.
4. Meningkatnya kualitas demokrasi.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SOPD beserta target kinerja sasaran terlihat pada tabel berikut:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021





Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SOPD

NO	TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3							
1	Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel	1 Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		B	BB	BB	BB	BB
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/Kegiatan		95%	95%	95%	95%	95%
2	Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.	Persentase peningkatan jumlah masyarakat terhadap wawasan kebangsaan		50%	55%	60%	65%	70%
			Persentase pendidik wawasan kebangsaan		0%	5%	10%	15%	20%
3	Menciptakan suasana aman, nyaman, tentram dan tertib di masyarakat	3 Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan,kenyamanan lingkungan	Persentase penurunan konflik sosial		5%	5%	5%	5%	5%
			Persentase penurunan angka kriminalitas		5%	5%	5%	5%	5%
4	Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis	4 Meningkatkan kualitas demokrasi	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		55	57	59	63	65

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SOPD adalah strategi dan kebijakan SOPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SOPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SOPD menunjukkan bagaimana cara SOPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SOPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SOPD.

A. Strategi

Berdasarkan hal tersebut di atas, strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam mencapai tujuan dan saran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur
2. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur
4. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
5. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang dan jasa
6. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-goverment*)
7. Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan kontijensi serta mengatasi berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat.
8. Meningkatkan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya eksekusi dari keberadaan/kehadiran orang asing
9. Meningkatkan pemantapan koordinasi dalam rangka pemantapan dan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat.
10. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama.

11. M
e

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



ngembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat.

12. Memantapkan proses pembauran bangsa di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
13. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang makna nilai-nilai luhur Pancasila di semua aspek kehidupan masyarakat
14. Mengembangkan sistem dan budaya politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infra struktur politik serta mantapnya interaksi antara infra dan supra struktur politik
15. Mendewasakan sikap dan prilaku masyarakat dalam berdemokrasi yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.
16. Meningkatkan pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
17. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan serta pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat.
18. Meningkatkan pengetahuan pengurus Ormas/LSM mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ormas/LSM

B. Kebijakan

Arah Kebijakan yang dirumuskan guna pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian
2. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur
3. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis indikator kinerja
4. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan pelatihan dalam rangka penanganan masalah strategis daerah.
6. Membentuk tim pengawasan orang asing dan melakukan rapat-rapat pembahasan keberadaan orang asing.

7. M
e

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



lakukan rapat pembahasan dan sosialisasi peraturan dalam penanganan aliran kepercayaan masyarakat.

8. Menyelenggarakan forum kerukunan umat beragama.
9. Melakukan koordinasi dan mengadakan forum pemantapan wawasan kebangsaan
10. Memberikan sosialisasi dalam rangka memperkuat rasa kebangsaan
11. Memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai luhur bangsa
12. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembekalan politik bagi masyarakat.
13. Mengadakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba.
14. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pencegahan dan pemberantasan maksiat
15. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas/LSM.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SOPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SOPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SOPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SOPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SOPD.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
 - d. Penyusunan Renstra SKPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - b. Pengadaan Perlengkapan Kantor
 - c. Pengadaan Peralatan Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

b. P
e

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



ngadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi
 - k. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar
 - a. Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya
5. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 - a. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
 - b. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
 - c. Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara
 - d. Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental
6. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama
 - a. Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
 - b. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi
7. Program pencegahan penanganan dan rehabilitasi narkoba
 - a. Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



- rkoba
- b. Fasilitas Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)
 - c. Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi
 - d. Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi
 - e. Sosialisasi Melalui Media Elektronik dan media massa lainnya bahaya Narkoba
8. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- a. Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah
 - b. Pengawasan Orang Asing
 - c. Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat
 - d. Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
 - e. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian
 - f. Forum Fasilitas Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah
 - g. Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana
 - h. SATGAS Saber Pungli
9. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
- a. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada
 - b. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada
10. Program pendidikan politik masyarakat
- a. Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi
 - b. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
 - c. Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
 - e. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik
 - f. Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi
 - g. Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat
 - h. Pembinaan kepada kader Parpol

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

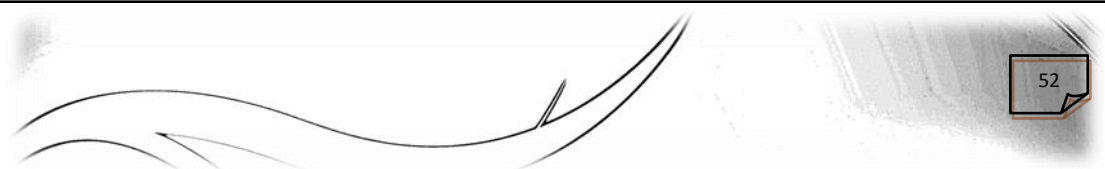


Rencana Program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif terdapat pada tabel berikut:



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021





Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SOPD
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi

Rp	target	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi		
							2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target			Rp	target	Rp			target	Rp
Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ Kegiatan		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD			705,000		2,020,000		2,320,000		2,320,000		12,736,000		20,101,000		
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD	10 Eks	10 Eks	125,000	10 Eks	568,000	10 Eks	668,000	10 Eks	668,000	10 Eks	668,000	50 Eks	2,697,000	Tata Usaha	BKT
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah rencana kerja dan keuangan SKPD	10 Eks	10 Eks	295,000	10 Eks	965,000	10 Eks	1,065,000	10 Eks	1,065,000	10 Eks	1,065,000	50 Eks	4,455,000	Tata Usaha	BKT
				Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	anyaknya buku renstra yang tersedia	18 Eks	18 Eks	285,000	18 Eks	487,000	18 Eks	587,000	18 Eks	587,000	18 Eks	587,000	90 Eks	2,533,000	Tata Usaha	BKT
				Penyusunan Renstra SKPD	Renstra SKPD	10 Eks	-	-	-	-	-	-	-	10 Eks	10,416,000	10 Eks	10,416,000	Tata Usaha	BKT	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur			-		-		55,000,000		55,000,000		280,000,000		390,000,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

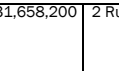


				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dibeli	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	-	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2		1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	25,000,000	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	25,000,000	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4	250,000,000	4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2 - 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4	300,000,000	Tata Usaha	BKT
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	1 Paket	1 Unit Lemari Arsip	-	1 Unit Lemari Arsip	-	1 Unit Lemari Arsip	10,000,000	1 Unit Lemari Arsip	10,000,000	1 Unit Lemari Arsip	10,000,000	5 Unit Lemari Arsip	30,000,000	Tata Usaha	BKT
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	1 Paket	1 Unit Laptop - 1 Unit Infokus	-	1 Unit Laptop - 1 Unit Printer	-	1 Unit Laptop - 1 Unit Printer	20,000,000	1 Unit Laptop - 1 Unit Printer	20,000,000	1 Unit Laptop - 1 Unit Printer	20,000,000	5 Unit Laptop - 1 Unit Infokus - 4 Unit Printer	60,000,000	Tata Usaha	BKT
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			-		-		20,000,000		20,000,000		20,000,000		60,000,000		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	20 Stel	20 Stel	-	20 Stel	-	20 Stel	10,000,000	20 Stel	10,000,000	20 Stel	10,000,000	100 stel	30,000,000	Tata Usaha	BKT
				Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas khusus hari tertentu yang dibeli	20 Stel	20 Stel	-	20 Stel	-	20 Stel	10,000,000	20 Stel	10,000,000	20 Stel	10,000,000	100 stel	30,000,000	Tata Usaha	BKT
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			190,937,900		316,719,200		341,569,200		341,769,200		334,564,200	-	1,525,559,700		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan buku cek yang tersedia	300 Lbr Materai dan 2 Buku Cek	400 Lbr Materai, 2 Buku Cek, dan Perangko	1,000,000	400 Lbr Materai dan 2 Buku Cek, dan Perangko	2,000,000	500 Lbr Materai dan 3 Buku Cek, dan Perangko	2,300,000	500 Lbr Materai dan 3 Buku Cek, dan Perangko	2,300,000	500 Lbr Materai dan 3 Buku Cek, dan Perangko	2,300,000	2400 Lbr Materai dan 15 Buku Cek dan Perangko	9,900,000	Tata Usaha	BKT
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan	24 Tagihan	24 Tagihan	6,240,000	24 Tagihan	7,800,000	24 Tagihan	8,250,000	24 Tagihan	8,250,000	24 Tagihan	745,000	120 Tagihan	31,285,000	Tata Usaha	BKT
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	34,819,200	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	53,256,000	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	53,256,000	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	53,256,000	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	53,256,000	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	247,843,200	Tata Usaha	BKT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan kantor yang dibersihkan	2 Ruangan	2 Ruangan	30,727,200	2 Ruangan	 2 Ruangan	31,658,200	2 Ruangan	31,658,200	2 Ruangan	31,658,200	2 Ruangan	157,360,000	Tata Usaha	BKT	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	2,350,000	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	3,300,000	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	3,800,000	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	4,000,000	4,300,000	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4 unit printer	17,750,000	Tata Usaha	BKT	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	11,712,500	1 Paket	13,795,000	1 Paket	14,795,000	1 Paket	14,795,000	14,795,000	5 Paket	69,892,500	Tata Usaha	BKT	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan	10 Macam Barang Cetakan dan 1 Paket Pengandaan	10 Macam Barang Cetakan dan 1 Paket Pengandaan	8,905,000	10 Macam Barang Cetakan dan 1 Paket Pengandaan	10,010,000	10 Macam Barang Cetakan dan 1 Paket Pengandaan	11,010,000	10 Macam Barang Cetakan dan 1 Paket Pengandaan	11,010,000	10 Macam Barang Cetakan dan 1 Paket Pengandaan	11,010,000	10 Macam Barang Cetakan dan 1 Paket Pengandaan	51,945,000	Tata Usaha	BKT
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	955,000	1 Paket	1,750,000	1 Paket	2,350,000	1 Paket	2,350,000	1 Paket	2,350,000	5 Paket	9,755,000	Tata Usaha	BKT
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1 paket	1 paket	4,229,000	1 paket	10,650,000	1 paket	11,650,000	1 paket	11,650,000	1 paket	11,650,000	5 paket	49,829,000	Tata Usaha	BKT
				Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah laporan perjalanan dinas	1 Tahun	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	180,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	200,000,000	5 Tahun	870,000,000	Tata Usaha	BKT
				Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Banyaknya administrasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan	1 Ls	4 Paket	-	4 Paket	2,500,000	4 Paket	2,500,000	4 Paket	2,500,000	4 Paket	2,500,000	20 Paket	10,000,000	Tata Usaha	BKT
Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam	Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan	Persentase peningkatan jumlah masyarakat	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan			-		76,000,000		76,000,000		76,000,000		76,000,000		304,000,000			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.	yang memahami wawasan kebangsaan	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Jumlah laporan pelaksanaan upacara	4 Kali	12 Kali	-	12 Kali	76,000,000	12 Kali	76,000,000	12 Kali	76,000,000	12 Kali	76,000,000	12 Kali	304,000,000	Seksi Bina Kesbang	BKT
		Persentase pendidik wawasan kebangsaan	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan/pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan			147,160,600		419,965,500		421,380,500		421,380,500		411,380,500		1,821,267,600		
			Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah laporan kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	40,281,600	12 Laporan	71,305,500	12 Laporan	81,305,500	12 Laporan	81,305,500	12 Laporan	71,305,500	12 Laporan	345,503,600	Seksi Bimam dan Bimas	BKT
			Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta pembinaan	300 Orang	300 Orang	27,054,000	300 Orang	99,330,000	300 Orang	109,330,000	300 Orang	109,330,000	300 Orang	109,330,000	1500 Orang	454,374,000	Seksi Bina Kesbang	BKT
			Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Ideologi Negara dan Bela Negara	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan	300 Orang	300 Orang	79,825,000	300 Orang	99,330,000	300 Orang	80,745,000	300 Orang	80,745,000	300 Orang	80,745,000	300 Orang	421,390,000	Seksi Bina Kesbang	BKT
			Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	Jumlah peserta pelatihan	300 Orang	300 Orang	-	300 Orang	150,000,000	300 Orang	150,000,000	300 Orang	150,000,000	300 Orang	150,000,000	300 Orang	600,000,000	Seksi Bina Kesbang	BKT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



Menciptakan suasana aman, nyaman, tentram dan tertib di masyarakat	Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan,kenyamanan lingkungan	Persentase penurunan konflik sosial Persentase penurunan angka kriminalitas	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Persentase Kualitas Pemahaman dan Pengalaman Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama			300,511,000		395,847,500		395,847,500		395,847,500		395,847,500		1,883,901,000		
			Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan masyarakat	Jumlah laporan	12 Laporan	12 Laporan	292,750,000	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	1,692,750,000	Seksi Bimum dan Bimas	BKT
			Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Jumlah laporan pembinaan	12 Laporan	12 Laporan	7,761,000	12 Laporan	45,847,500	12 Laporan	45,847,500	12 Laporan	45,847,500	12 Laporan	45,847,500	12 Laporan	191,151,000	Seksi Bimum dan Bimas	BKT
			Program Pencegahan, Penanganan Dan Rehabilitasi Narkoba	Persentase penurunan kasus narkoba di Bukittinggi			89,534,500		518,637,000		320,225,000		320,225,000		320,225,000		1,340,434,500		
			Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah peserta pembekalan	300 Orang	300 Orang	14,637,600	300 Orang	74,549,000	300 Orang	74,549,000	300 Orang	74,549,000	300 Orang	74,549,000	1500 Orang	312,833,600	Seksi Bimum dan Bimas	BKT
			Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	Jumlah laporan pelaksanaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	97,500,000	1 Kegiatan	97,500,000	1 Kegiatan	97,500,000	5 Kegiatan	370,000,000	Seksi Bimum dan Bimas	BKT
			Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Jumlah laporan operasinalisasi	12 Laporan	12 Laporan	34,569,400	12 Laporan	44,088,000	12 Laporan	54,088,000	12 Laporan	54,088,000	12 Laporan	54,088,000	60 Laporan	240,921,400	Seksi Bimum dan Bimas	BKT
			Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Jumlah ASN yg tes urine	1 laporan	4 Kegiatan	40,327,500	4 Kegiatan	250,000,000	4 Kegiatan	44,088,000	4 Kegiatan	44,088,000	4 Kegiatan	44,088,000	4 Kegiatan	216,679,500	Seksi Bimum dan Bimas	BKT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



			Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa lainnya bahaya Narkoba	Jumlah laporan sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	-	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	200,000,000	Seksi Bimud dan Bimas	BKT
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah			673,990,000		1,369,159,500		1,054,958,500		1,054,958,500		1,054,958,500		5,208,025,000		
			Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi	12 Laporan	12 Laporan	181,361,400	12 Laporan	371,680,000	12 Laporan	371,680,000	12 Laporan	371,680,000	12 Laporan	371,680,000	60 Laporan	1,668,081,400	Seksi Bina Kesbang	BKT
			Pengawasan Orang Asing	Jumlah laporan kasus	12 laporan	12 laporan	37,098,600	12 laporan	292,750,000	12 laporan	292,750,000	12 laporan	292,750,000	12 laporan	292,750,000	60 laporan	1,208,098,600	Seksi Bina Kesbang	BKT
			Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah laporan kasus	12 Laporan	12 Laporan	32,753,000	12 Laporan	55,847,500	12 Laporan	55,847,500	12 Laporan	55,847,500	12 Laporan	55,847,500	60 Laporan	256,143,000	Seksi Bina Kesbang	BKT
			Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan rencana aksi	12 Laporan	12 Laporan	58,576,000	12 Laporan	184,681,000	12 Laporan	184,681,000	12 Laporan	184,681,000	12 Laporan	184,681,000	60 Laporan	797,300,000	Seksi Bina Politik	BKT
			Pemantauan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi/ijin penelitian dan keramaian	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	400,000,000	Seksi Bina Kesbang	BKT
			Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka ketahanan ekonomi di daerah	Jumlah laporan monitoring	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	100,000,000	Seksi Bina Kesbang	BKT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



			Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana	Jumlah laporan pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	100,000,000	Seksi Bina Kesbang	BKT
			SATGAS Saber Pungli	Jumlah laporan sosialisasi	12 laporan	12 laporan	364,201,000	12 laporan	364,201,000	-	-	-	-	-	-	-	728,402,000	Seksi Bina Kesbang	BKT
Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis	Meningkatnya kualitas demokrasi	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada	Persentase keterlibatan masyarakat pada pemilihan umum			-		500,000,000		500,000,000		200,000,000		200,000,000		1,400,000,000		
			Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu / Pilkada	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi	200 orang	-	-	200 orang	200,000,000	200 orang	200,000,000	200 orang	200,000,000	200 orang	200,000,000	200 orang	800,000,000	Seksi Bina Politik	BKT
			Koordinasi dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pemilu / Pilkada	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan	12 Laporan	-	-	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	-	-	-	-	12 Laporan	600,000,000	Seksi Bina Politik	BKT
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum			1,039,292,000		1,397,540,000		1,607,010,000		1,607,010,000		1,607,010,000		7,257,862,000		
			Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Jumlah laporan koordinasi	12 Laporan	12 Laporan	986,555,000	12 Laporan	986,555,000	12 Laporan	986,555,000	12 Laporan	986,555,000	12 Laporan	986,555,000	60 Laporan	4,932,775,000	Seksi Bina Politik	BKT
			Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah laporan verifikasi parpol yang telah mendapatkan bantuan keuangan	11 Parpol	11 Parpol	6,392,000	11 Parpol	12,636,000	11 Parpol	15,636,000	11 Parpol	15,636,000	11 Parpol	15,636,000	11 Parpol	65,936,000	Seksi Bina Politik	BKT
			Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah laporan pembinaan ormas	12 Laporan	12 Laporan	25,714,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	250,000,000	60 Laporan	810,714,000	Seksi Bina Politik	BKT
			Bimtek Pengajuan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah peserta bimtek	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	120,000,000	Seksi Bina Politik	BKT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



			Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Jumlah peserta sosialisasi	50 Orang	50 Orang	11,163,000	50 Orang	31,860,500	50 Orang	31,860,500	50 Orang	31,860,500	250 Orang	138,605,000	Seksi Bina Politik	BKT
			Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Jumlah buku data ormas yang dicetak	40 Eks	40 Eks	-	40 Eks	22,138,500	40 Eks	22,138,500	40 Eks	22,138,500	200 Eks	88,554,000	Seksi Bina Politik	BKT
			Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Jumlah peserta peningkatan kesadaran	100 Orang	100 Orang	9,468,000	100 Orang	17,820,000	100 Orang	20,820,000	100 Orang	20,820,000	500 Orang	89,748,000	Seksi Bina Politik	BKT
			Pembinaan kepada kader Parpol	Jumlah laporan pembinaan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	1,000,000,000	Seksi Bina Politik	BKT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SOPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SOPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja SOPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pembauran kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu			75%	75%	75%	70%	75%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021



BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat dengan Renstra SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-SOPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SOPD dengan berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dimaksudkan agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pencapaian visi SOPD mendukung pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi serta selaras dengan pembangunan daerah provinsi serta pembangunan nasional.

Selanjutnya, Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 ini dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan yang merupakan landasan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan bentuk pengoperasionalan rencana kerja ke dalam proses penganggaran dan pada akhirnya dapat dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi guna mencapai tujuan pembangunan Kota Bukittinggi khususnya dan nasional umumnya.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITINGGI TAHUN 2016-2021